Analisis Perencanaan Pembiayaan Kesehatan Penanganan Covid 19 Di Pemerintah Kota Pekanbaru Yang bersumber Dari Pemerintah Tahun 2020

Ricardo¹, Wen Via Trisna²

^{1,2} Universitas Hang Tuah Pekanbaru, Riau, Indonesia

Email: ¹Ricardo@htp.ac.id , ²rhinakhajol@gmail.com

Abstrac

COVID-19 is an infectious disease caused by a newly discovered type of coronavirus. Coronaviruses are a group of viruses that can cause disease in animals or humans. Several types of coronavirus are known to cause respiratory tract infections in humans ranging from coughs and colds to more serious ones such as Middle East Respiratory Syndrome (MERS) and Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). The results showed that the total Regional Budget of Pekanbaru City Government was Rp. 2,799,493,930,593. The total budget for the handling of Covid 19 in 2020 in Pekanbaru City, which is sourced from the Government, is Rp. 192,621,537,270. Source of Funding from the Central Government Rp. 40,933,369,000, from Riau Province Financial Aid Rp. 36,195,800,000 and from the Pekanbaru City Regional Revenue and Expenditure Budget, Rp. 115,492,368,270. In the management of the Covid 19 Handling Budget in Pekanbaru City, it is managed by several Regional Apparatus Organizations (OPD) including the Pekanbaru City Health Office, Social Service, Industry and Trade Office, Regional Disaster Management Agency and involving sub-districts and urban villages in the Pekanbaru City area.

Keywords: *Health Financing, Covid 19*

Abstrak

COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis *coronavirus* yang baru ditemukan. Coronavirus adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Beberapa jenis coronavirus diketahui menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia mulai dari batuk pilek hingga yang lebih serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome (MERS)* dan *Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru Rp. 2.799.493.930.593. Total Anggaran penanganan Covid 19 Tahun 2020 Di Kota Pekanbaru yang bersumber dari Pemerintah adalah sebesar Rp. 192.621.537.270. Sumber Pembiayaan dari Pemerintah Pusat Rp. 40.933.369.000, Dari Bantuan Keuangan Propinsi Riau Rp. 36.195.800.000 dan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Rp. 115.492.368.270. Dalam pengelolaannya Anggaran Penanganan Covid 19 di kota pekanbaru di kelola Oleh Beberapa organisasi Perangkat Daerah (OPD) diantaranta Dinas kesehatan Kota Pekanbaru, Dinas Sosial, Dinas perindustrian dan perdagangan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan melibatkan kecamatan dan kelurahan yang ada diwilayah Kota Pekanbaru.

Kata kunci: *Pembiayan Kesehatan, Covid 19*

PENDAHULUAN

Coronavirus adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan

penyakit pada hewan atau manusia. Beberapa jenis *coronavirus* diketahui menyebabkan infeksi saluran nafas

pada manusia mulai dari batuk pilek hingga yang lebih serius seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS).

Coronavirus jenis baru yang ditemukan menyebabkan penyakit COVID-19. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis *coronavirus* yang baru ditemukan. Ini merupakan virus baru dan penyakit yang sebelumnya tidak dikenal sebelum terjadi wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019.

Berdasarkan laporan *World Health Organisation* (WHO) kasus Covid 19 terkonfirmasi sampai minggu ke dua April 2020 sebanyak 1.614.951 (satu juta enam ratus empat belas ribu Sembilan ratus lima puluh satu) kasus di seluruh dunia, yang mengakibatkan kematian sebanyak 99.887 (Sembilan puluh Sembilan ribu delapan ratus delapan puluh tujuh) kasus. Kasus ini tersebar hampir di 213 negara di dunia.

Di Indonesia kasus covid 19 pertama kali terkonfirmasi pada tanggal 2 maret 2020 yang di sampaikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Ir Joko Widodo dan didampingi oleh menteri kesehatan Republik Indonesia Terawan Agus Putranto melalui media elektronik. Sampai awal April 2020 kasus ini terus meningkat. Lebih dari 1.600 (seribu enam ratus) kasus terkonfirmasi di Indonesia yang tersebar di beberapa provinsi di seluruh Indonesia (Kemenkes, 2020).

Provinsi Riau juga salah satu provinsi yang mempunyai dampak kasus Covid 19 ini. Sampai awal April diperkirakan ada 16 kasus pasien positif Covid 19 yang ada di Provinsi Riau (Sumber: Diskominfo Prov Riau) dan Kota Pekanbaru merupakan daerah paling banyak

kasus positif covid 19 sampai dengan awal April 2020.

Berikut kebijakan kebijakan oleh Pemerintah Pusat yang disampaikan Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani yang di kutip melalui laman resmi kementerian keuangan (kemenkeu, 2020)

1. Anggaran negara diprioritaskan untuk:
 - a. Menjamin kesehatan dan keselamatan masyarakat, termasuk tenaga medis;
 - b. Memastikan perlindungan dan Jaring Pengaman Sosial untuk masyarakat rentan;
 - c. Perlindungan terhadap dunia usaha.
2. Pada masa tanggap darurat pandemi COVID-19, APBN difokuskan untuk:
 - a. Pemeriksaan (*testing*) bagi korban;
 - b. Peningkatan kapasitas Rumah Sakit;
 - c. Ketersediaan obat-obatan dan alat-alat kesehatan.
3. Total tambahan belanja dan pembiayaan APBN 2020 untuk penanganan dampak Covid-19 sebesar Rp405,1 triliun, terdiri atas:
 - a. Bidang kesehatan Rp75 triliun;
 - b. Perluasan Jaring Pengaman Sosial Rp110 triliun;
 - c. Dukungan industri (insentif perpajakan dan stimulus KUR) Rp70,1 triliun;
 - d. Pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional Rp150 triliun.

Anggaran dan instrumen fiskal tetap dikelola untuk menekan dampak jangka panjang, termasuk memastikan terpenuhinya kecukupan pangan dan menggerakkan kembali perekonomian yang melambat. Kementerian Keuangan berkolaborasi dengan

Gugus Tugas Penanganan Covid-19, Kementerian dan lembaga dan pemerintah Daerah dalam mengatasi masalah ini. Kami mengajak seluruh pemangku kepentingan dan warga negara untuk berkontribusi dan mendukung langkah pemerintah.

1. Di sektor Kesehatan Pemerintah pusat melalui kementerian keuangan juga menyiapkan anggaran sebesar Rp 75 Triliun yang digunakan untuk: Rp 65,8 triliun untuk belanja penanganan kesehatan:

- o Alat kesehatan (APD, test kit, reagen, ventilator, hand sanitizer, dan lain lain) Sarana dan prasarana kesehatan, antara lain upgrade 132 rumah sakit rujukan bagi penanganan pasien Covid-19, termasuk Wisma Atlet;
- o Dukungan sumber daya manusia (SDM).

2. Rp 5,9 triliun untuk insentif tenaga media pusat dan daerah:

- o Tenaga medis pusat sebesar Rp1,3 triliun dan tenaga medis daerah Rp4,6 triliun;
- o Insentif dokter (spesialis Rp 15 juta/bulan), dokter umum (Rp 10 juta/bulan), perawat (Rp 7,5 juta/bulan), dan tenaga kesehatan lainnya (Rp 5 juta/bulan). Diberikan selama 6 bulan.
- o Kebutuhan anggaran untuk insentif bagi tenaga medis yang dihitung adalah hanya untuk tenaga medis di Rumah Sakit Pusat, satuan kerja KKP, dan Unit Pelaksana Teknis di bidang kesehatan lingkungan dalam lingkungan Departemen Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Instalasi Kesehatan, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan,

balitbangkes, termasuk yang bertugas di RS Wisma Atlet.

- o Anggaran untuk insentif ditanggung bersama oleh Pemerintah Pusat dan Daerah, termasuk menggunakan DAK Nonfisik Kesehatan dari Biaya Operasional Kesehatan dan APBD.
3. Rp300 miliar untuk santunan kematian bagi tenaga kesehatan (Rp300 juta/orang);
4. Rp 3 triliun dialokasikan ke subsidi iuran untuk penyesuaian tarif Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja sesuai Perpres 75 tahun 2019.

Dalam hal percepatan penanganan covid 19 Kementerian dalam negeri juga mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 tahun 2020 tentang Percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 Di lingkungan Pemerintah Daerah. Yang menyebutkan bahwa Pemerintah daerah perlu melakukan langkah antisipasi dengan penanganan dampak penularan covid 19. Pemerintah perlu memprioritaskan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk antisipasi dan penanganan dampak Covid 19. Pada pasal 4 Dalam permendagri No 20 tahun 2020 juga disebutkan bahwa pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya yang selanjutnya akan diusulkan dalam perubahan APBD. Dalam pasal ini juga disebutkan bahwa penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan yang di formulasikan terlebih dahulu dalam perubahan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah dalam waktu paling 1 (satu) hari.

Kota Pekanbaru adalah salah satu Kota di Indonesia yang mempunyai beberapa kasus Covid 19. Sampai dengan awal April sedikitnya 6 kasus positif yang tersebar di beberapa kecamatan di Kota Pekanbaru. Sesuai dengan imbauan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Virus Corona atau Covid-19 di daerah, Pemerintah kota Pekanbaru dengan DPRD telah membahas tentang pergeseran anggaran dan persiapan pembiayaan kesehatan penanggulangan wabah virus corona atau covid-19 di Kota Pekanbaru (Go Riau, 2020).

Untuk dapat mengetahui bagaimana persiapan anggaran dan pembiayaan kesehatan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dalam penanganan wabah Covid 19 perlu dilakukan analisis pembiayaan kesehatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kota Pekanbaru. Berdasarkan fakta dan kondisi diatas perlu dilakukan penelitian untuk menganalisis pembiayaan kesehatan dengan judul Analisis Perencanaan Pembiayaan Kesehatan Penanganan Covid 19 Pada Pemerintah Kota Pekanbaru yang bersumber dari Pemerintah.

METODE

Desain penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan evaluatif, yang bertujuan menganalisis perencanaan pembiayaan kesehatan dalam

penanganan Wabah Covid 19 yang bersumber dari pemerintah serta melihat peruntukan belanja kesehatannya menurut empat dimensi District Health Account (DHA) yaitu menurut peruntukan sumber biaya, pengelola anggaran/ agen, penyedia pelayanan dan fungsi program di Pemerintah Kota Pekanbaru dalam penanganan Covid 19. Kemudian penulis melakukan analisis dengan cara:

- a. mendeskripsikan data sekunder dan primer yang diperoleh di lapangan
- b. menganalisa dan
- c. menyimpulkan untuk menjawab tujuan penelitian.

Pengumpulan data sekunder dilakukan di Pemerintah Kota Pekanbaru yaitu semua dokumen yang relevan dengan belanja kesehatan tersebut, dengan mengambil data laporan realisasi fisik dan keuangan kinerja APBD Kota Pekanbaru yang terkait dengan penanganan Covid 19 serta mengumpulkan data primer dengan melakukan wawancara pihak terkait untuk mendukung data sekunder. Selanjutnya peneliti menelusuri data yang digunakan membelanjakan anggarannya untuk tujuan kesehatan yang diambil dari pencatatan keuangan dari masing masing instansi pengelola yaitu meliputi dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan realisasi anggaran dari setiap pengelola. Data tersebut kemudian diinput dalam tool DHA dan disajikan dalam bentuk tabel tabel. Analisis terhadap data sekunder dengan langkah langkah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi aliran dana yang digunakan untuk belanja kesehatan ke instansi yang terkait penanganan Covid 19.
2. Mengidentifikasi realisasi belanja kesehatan untuk program program

yang terkait dengan penanganan Covid 19 di Pemerintah Kota Pekanbaru

HASIL

Table 1 Ringkasan APBD Kota

Pekanbaru Tahun Anggaran 2020

Ko de	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih
4.	PENDAPATAN DAERAH	2.612.142.090.305	2.784.200.316.653	172.058.226.348
4.1	Pendapatan Asli Daerah	994.101.907.412	1.126.476.692.701	132.374.785.289
4.1.1.	Hasil Pajak Daerah1)	821.026.841.929	921.026.841.929	100.000.000.000
4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah 1)	118.605.065.483	161.605.065.483	43.000.000.000
4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.500.000.000	4.500.000.000	-
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	49.970.000.000	39.344.785.289	10.625.214.711
4.2	Dana Perimbangan	1.416.724.061.000	1.229.773.057.000	186.951.004.000
4.2.1.	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	272.974.410.000	221.369.241.000	51.605.169.000
4.2.2.	Dana Alokasi Umum	906.014.576.000	818.435.221.000	87.579.355.000
4.2.3.	Dana Alokasi Khusus	237.735.075.000	189.968.595.000	47.766.480.000
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	201.316.121.893	427.950.566.952	226.634.445.059
4.3.1.	Pendapatan Hibah	-	105.855.417.188	105.855.417.188
4.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 2)	156.173.562.893	234.549.980.764	78.376.417.871
4.3.5.	Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya	-	43.611.800.000	43.611.800.000
4.3.6.	Dana Insentif Daerah	45.142.559.000	43.933.369.000	1.209.190.000
5.	BELANJA DAERAH	2.613.792.090.305	2.798.493.930.593	184.701.840.288
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.079.370.456.650	1.040.657.430.378	38.713.026.272

5.1.1.	Belanja Pegawai	1.016.650.535.024	846.755.295.454	-169.895.239.570
5.1.3.	Belanja Subsidi	27.000.000.000	27.970.325.028	970.325.028
5.1.4.	Belanja Hibah	28.646.787.626	23.743.641.626	4.903.146.000
5.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	2.073.134.000	-	2.073.134.000
5.1.8.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000	142.188.168.270	137.188.168.270
5.2	BELANJA LANGSUNG	1.534.421.633.655	1.757.836.500.215	223.414.866.560
5.2.1.	Belanja Pegawai	25.480.455.704	45.567.657.904	20.087.202.200
5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	966.848.917.217	1.171.159.182.594	204.310.265.377
5.2.3.	Belanja Modal	542.092.260.734	541.109.659.717	982.601.017
	SURPLUS/(DEFISIT)	-1.650.000.000	-14.293.613.940	-12.643.613.940
6.	PEMBIAYAAN DAERAH	1.650.000.000	14.293.613.940	12.643.613.940
6.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	1.650.000.000	15.293.613.940	13.643.613.940
6.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	1.650.000.000	15.293.613.940	13.643.613.940
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	1.650.000.000	15.293.613.940	13.643.613.940
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	1.000.000.000	1.000.000.000
6.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	-	1.000.000.000	1.000.000.000
6.2.2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	-	1.000.000.000	1.000.000.000
	PEMBIAYAAN NETO	1.650.000.000	14.293.613.940	12.643.613.940
6.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	-	-	-

Sumber: BPKAD Kota Pekanbaru (APBDP TA 2020)

Dari Tabel ringkasan APBD-P tahun 2020 diatas dapat dilihat Anggaran Pendapatan Kota Pekanbaru bertambah sebesar 172.058.226.348,00 atau Sebesar 6,59% dari anggaran sebelumnya. Penambahan anggaran pendapatan ini berasal dari Pajak Daerah 100.000.000.000, Retribusi Daerah Sebesar 43.000.000.000, 00, Pendapatan Hibah sebesar 105.855.417.188,00 Dana bagi hasil pajak dari provinsi sebesar 78.376.417.871,00 dan Bantuan Keuangan Provinsi Riau sebesar 43.611.800.000,00. Dari sisi belanja daerah juga mangalami kenaikan anggaran sebesar 7,07% atau sebesar 184.701.840.288,00. Rincian penambahan belanja ini terdiri dari belanja subsidi sebesar 970.325.028,00 belanja tidak terduga sebesar 137.188.168.270,00 belanja pegawai dari belanja langsung sebesar 20.087.202.200,00 dan belanja barang dan jasa sebesar 204.310.265.377,00.

Kepala Bidang Anggaran BPKAD Kota Pekanbaru melalui wawancara menyampaikan:

“Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru tahun 2020 ini mengalami kenaikan dari APBD murni, hal ini disebabkan karena naiknya potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan adanya pendapatan hibah dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Keuangan dari pemerintah Propinsi Riau untuk penanganan dampak sosial Covid 19 di Kota Pekanbaru. Dari segi belanja daerah kita pemerintah kota pekanbaru juga melakukan pergeseran anggaran beberapa kali untuk memaksimalkan anggaran dalam penanganan covid 19 sesuai intruksi presiden melalui kementerian dalam negeri tentang refocussing anggaran Pemerintah Daerah”.

Tabel 2 Tentang Ringkasan APBD untuk Belanja Kesehatan

Total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2020	1.757.836.500.215
Total Belanja Langsung Untuk Kesehatan	192.867.376.316
Total Belanja Tidak Langsung/ Gaji	109.977.720.844
Kecukupan 10% dari APBD berdasarkan UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan	10.97%

Sumber: Bpkad Kota Pekanbaru 2020 (data diolah)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pemerintah Kota Pekanbaru telah mengalokasikan 10,97% APBD-nya untuk sektor kesehatan. Hal ini sudah sesuai dengan amanah dari Undang undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Tabel 3 Tabel Pembiayaan Kesehatan yang bersumber dari Pemerintah

No	Sumber Biaya	Jumlah	Persen tase
1	FS.1.1.1 Pemerintah pusat (DAK, DID)	82.298.413.606,00	43%
2	FS.1.1.2 Propinsi (Pajak Rokok)	12.496.671.034,00	6%
3	FS.1.1.3 Kabupaten/kota (DAU, DBH, PAD,	98.072.291.676,00	51%

	BLUD)		
	Total	192.867.376.316,00	100%

Sumber: Bpkad Kota Pekanbaru 2020 (data diolah)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sumber pembiayaan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Pekanbaru tahun 2020 bersumber dari transfer Pemerintah Pusat, yaitu dari Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan, Dana Insentif Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi hasil dari pemerintah pusat.

Dalam kutipan wawancara Kepala Bidang Anggaran BPKAD kota Pekanbaru menyampaikan:

“Saat ini Pemerintah Kota Pkanbaru masih sangat bergantung kepada Pemerintah pusat sebagai penyeimbang pendapatan daerah dalam mengakomodir kebutuhan belanja daerah. Namun pemerintah Kota Pekanbaru terus berusaha meningkatkan potensi daerah agar bias menambah pendapatan bagi daerah dalam pemenuhan kebutuhan belanja daerah di Pemerintah Kota Pekanbaru”.

Tabel 4 Biaya Kesehatan Berdasarkan Pengelola anggaran Pemerintah Kota Pekanbaru

No	Pengelola Pembiayaan	Jumlah	Perse ntase
1	HF. 1.1.3.1 Dinas Kesehatan	75.214.137.948,00	39%
2	HF. 1.1.3.2 RSD Madani	76.784.835.103,00	40%
3	HF. 1.1.3.4 Puskesmas	40.868.403.265,00	21%
	Total	192.867.376.316,00	100%

Sumber: Bpkad Kota Pekanbaru 2020 (data diolah)

Dari Tabel diatas dapat dilihat pada tahun 2020 Rumah Sakit Daerah Madani pengelola belanja terbesar yaitu 40%, dan selanjutnya oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru sebesar 39% dan paling rendah di kelola oleh Puskesmas sebesar 21%.

Tabel 5 Biaya Kesehatan Berdasarkan Penyedia Pelayanan

No	Pembe ri Layana n	Jumlah	Persent ase
1	HP. 1.1. RSD Madani	76.784.835.103,00	39,81%
2	HP. 3.4 Puskesmas	41.947.473.565,00	21,75%
4	HP. 5.1 Promkes	18.960.224.833,00	9,83%
5	HP. 5.1 Yankes	30.408.065.789,00	15,77%
6	HP. 5.2 Kesga	1.636.813.400,00	0,85%
7	HP. 5.1 Peceganhan penyakit menular	8.356.998.233,00	4,33%
8	HP. 5.1 TU/ Administrasi	14.711.566.938,00	7,63%
9	HP. 5.1 Lainnya	61.398.455,00	0,03%
	Total	192.867.376.316,00	100%

Sumber: Bpkad Kota Pekanbaru 2020 (data diolah)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Rumah Sakit Daerah Madani merupakan Penyedia administrasi kesehatan pemerintah yang dominan dalam memberikan pelayanan

kesehatan di Pemerintah Kota Pekanbaru sebesar 39,81%.

Table 6 Biaya Kesehatan Menurut Komponen Biaya/ Mata Anggaran

No	Komponen Biaya	Jumlah	Persentase
1	RC.1.1 Kompensasi bagi staf/petugas	4.507.525.752,00	2,34%
2	RC.1.2 Suplai dan pelayanan	109.096.976.748,00	56,57%
3	RC.1.3 Biaya pemeliharaan	2.353.493.815,00	1,22%
4	RC.1.7 Perjalanan	895.753.868,00	0,46%
5	RC.2.1 Bangunan	20.812.768.286,00	10,79%
6	RC.2.2 Benda Bergerak (Movable Equipment)	2.737.292.701,00	1,42%
7	RC.2.3 Capital transfer to providers	52.463.565.146,00	27,20%
	Total	192.867.376.316,00	100%

Sumber: Bpkad Kota Pekanbaru 2020 (data diolah)

Dari Kategori dana operasional dan pemeliharaan dapat dilihat bahwa biaya suplai dan pelayanan memiliki jumlah biaya paling besar yaitu 56,57%.

Tabel 9 Biaya Penanganan Covid 19 Berdasarkan Pengelola

No	Pengelola Pembiayaan	Jumlah	Persentase
1	HF. 1.1.3.1 Dinas Kesehatan	87.073.869.800,00	45,20%

2	HF. 1.1.3.5 Dinas Perindustrian dan Perdagangan	56.382.193.000,00	29,27%
3	HF. 1.1.3.6 Dinas Sosial	29.525.043.000,00	15,33%
4	HF. 1.1.3.7 Dinas Perhubungan	5.646.855.800,00	2,93%
5	HF. 1.1.3.8 Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman	707.584.820,00	0,37%
6	HF. 1.1.3.9 Badan Penganggulangan Bencana Daerah	2.334.152.850,00	1,21%
7	HF. 1.1.3.9 Dinas Pemadam Kebakaran	801.070.000,00	0,42%
8	HF. 1.1.3.10 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	29.268.000,00	0,02%
9	HF. 1.1.3.11 Satuan Polisi Pamong Praja	621.500.000,00	0,32%
10	HF. 1.1.3.12 Kecamatan	9.500.000,00	4,93%
	Total	192.621.537.270,00	100%

Sumber: Bpkad Kota Pekanbaru 2020 (data diolah)

Dari tabel diatas dapat dilihat pembiayaan penanganan covid 19 di Pemerintah Kota Pekanbaru di kelola oleh beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pembiayaan penanganan covid 19 di Pemerintah Kota Pekanbaru. Dinas Kesehatan merupakan pengelola anggaran terbesar yaitu 45,20%. Selanjutnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar 29,27% dan Dinas Sosial sebesar 15,33%.

**Tabel 10 Biaya Penganan Covid 19
Komponen Biaya/ Mata Anggaran**

N o	Komponen Biaya	Jumlah	Persentase
1	RC.1.1 Kompensasi bagi staf/petugas	6.800.454.524	3,53%
2	RC.1.2 Suplai dan pelayanan	155.188.289.120,00	80,57%
4	RC.1.3 Biaya pemeliharaan	581.713.140,00	0,30%
8	RC.2.3 Capital transfer to providers	30.051.080.486,00	15,60%
	Total	192.621.537.270,00	100%

Sumber: Bpkad Kota Pekanbaru 2020 (data diolah)

Dari data tabel diatas dapat dilihat bahwa komponen biaya terbesar adalah untuk suplai dan pelayanan kesehatan untuk penanganan covid 19 sebesar 80,57%. Anggaran tersebut diantaranya biaya pengadaan material, bahan, obat dan perbekalan kesehatan, jasa. Sedangkan komponen belanja terbesar

kedua adalah capital transfer to providers sebesar 15.60% yaitu anggaran belanja modal diantaranya belanja modal alat kesehatan, belanja modal alat kedokteran dan belanja modal lainnya sebagai penunjang upaya penanganan covid 19 di Pemerintah Kota Pekanbaru. Selanjutnya ada kompensasi bagi staf atau petugas sebesar 3,53% adalah belanja tambahan insentif tenaga kesehatan untuk kegiatan Peningkatan surveillance epideminologi dan penanggulangan wabah. Dan komponen biaya pemeliharaan sebesar 0.30% dari total anggaran penanganan covid 19 yaitu untuk pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit dan pendukungnya.

Tabel 11 Pembiayaan Penanganan Covid 19 berdasarkan benefit (BC) di Pemerintah Kota Pekanbaru

N o	Uraian	Jumlah	Persentase
1	BC.1.1 Masyarakat Umum	94.475.148.720,00	49,05%
2	BC. 1.2 Masyarakat miskin	27.895.800.000,00	14,48%
3	BC. 2 Aparatur Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Puskesmas dan Faskes lainnya	70.250.588.550,00	36,47%
	Total	192.621.537.270,00	100%

Sumber: Bpkad Kota Pekanbaru 2020 (data diolah)

Klasifikasi penerima manfaat (Beneficiaries) atas pembiayaan penanganan covid 19 di Pemerintah Kota Pekanbaru menurut table DHA adalah masyarakat umum sebesar 49,05% yang diambil dari kategori Bantuan social safety net/jaring pengaman social. Yang kedua penerima manfaat adalah aparatur dalam dinas kesehatan RS umum dan puskesmas sebesar 36,47% termasuk didalamnya Insentif tenaga kesehatan, Operasional Rumah Sakit, Dinas Kesehatan dan Puskesmas dan biaya pendukung lainnya dalam upaya penanganan covid 19 Tahun Anggaran 2020 Di Pemerintah Kota Pekanbaru.

PEMBAHASAN

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2020 yang telah dipaparkan di hasil penelitian menunjukkan total APBD Kota Pekanbaru sebesar 2.799.493.930.593. dialokasikan dalam belanja daerah sebesar 2.798.493.930.593 dan Pengeluaran Pembiayaan untuk BUMD Kota Pekanbaru sebesar 1.000.000.000. Sedangkan alokasi anggaran kesehatan untuk tahun anggaran 2020 Pemerintah Kota Pekanbaru mengalokasikan sebesar 302.845.097.160 yang terdiri atas belanja tidak langsung sebesar 109.977.720.844 dan belanja langsung sebesar 192.867.376.316. Hal ini sudah sesuai dengan amanah Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menyatakan anggaran kesehatan minimal 10% dari Total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Pemerintah Daerah.

Anggaran Kesehatan di Kota Pekanbaru dikelola oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, Rumah

Sakit Daerah Madani dan 21 Puskesmas yang tersebar di wilayah Kota Pekanbaru yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran terdiri dari Program dan Kegiatan. Pembiayaan Kesehatan di Kota Pekanbaru bersumber dari Pemerintah Pusat yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Insentif Daerah (DID) sebesar 82.298.413.606. Selanjutnya dari Pajak Rokok sebesar 12.496.671.034. Sumber Pembiayaan Dari APBD Pemerintah Kota Pekanbaru 98.072.291.676.

Fokus Anggaran pemerintah Kota Pekanbaru pada tahun 2020 adalah di bidang Kesehatan, Bantuan social safety net/jaring pengaman social dan Penanganan Dampak Ekonomi. Total Anggaran Pembiayaan Penanganan Covid 19 Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2020 Rp. 192.621.537.270 yang bersumber dari Pemerintah Pusat melalui Dana Insentif Daerah sebesar Rp. 40.933.369.000, Bantuan Keuangan Propinsi sebesar Rp. 36.195.800.000 dan APBD Kota Pekanbaru sebesar Rp. 115.492.368.270. Sumber Pembiayaan ini dikelola oleh beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diantaranya oleh Dinas Kesehatan Rp. 87.073.869.800. atau sebesar 45.20%, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Rp. 56.382.193.000 atau sebesar 29.27% dan selanjutnya ada Dinas Sosial Rp. 29.525.043.000 dan OPD lain yang ditunjuk sebagai penanganan dampak Covid 19 dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

KESIMPULAN

1. Sebagian besar pembiayaan kesehatan penanganan Covid 19 bersumber APBD dimana APBD sebagian besarnya bersumber dana perimbangan Dana Alokasi Umum. Hal ini menunjukkan

bahwa kontribusi PAD terhadap pembiayaan kesehatan Penanganan Covid 19 di Pemerintah Kota Pekanbaru masih sangat rendah dan pembiayaan kesehatan juga masih sangat bergantung dari transfer dana dari pusat.

2. Tiga pengelola pembiayaan kesehatan penanganan Covid 19 terbesar di Pemerintah Kota Pekanbaru adalah Dinas kesehatan sebesar 45,20%, Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar 29,27% dan Dinas Sosial sebesar 15,33%.
3. Klasifikasi penerima manfaat anggaran penanganan covid 19 di Pemerintah Kota Pekanbaru terbesar adalah masyarakat umum sebesar 49,05%.

SARAN

1. Pemerintah Kota Pekanbaru hendaknya lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam perencanaan pembiayaan kesehatan penanganan covid 19 di Kota Pekanbaru
2. Pengelola pembiayaan kesehatan penanganan covid 19 lebih melibatkan organisasi perangkat daerah lainnya seperti kecamatan dan kelurahan dan organisasi non pemerintah lainnya.
3. Klasifikasi penerima manfaat anggaran penanganan covid 19 di Kota Pekanbaru lebih di tingkatkan dan menyentuh ke masyarakat kurang mampu.

DAFTAR PUSTAKA

- Azwar, A. (2010). *Pengantar Administrasi Kesehatan*, Binarupa Aksara Publisher
- Peraturan Menteri Kesehatan. *Tentang Perencanaan dan Penganggaran*. PMK Nomor 7 tahun 2014. Kementerian Kesehatan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri. *Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di lingkungan Pemerintah Daerah*. Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 Kementerian Dalam Negeri.

Yatiman, dkk. 2013. *Analisis Efisiensi Teknis Anggaran Belanja Sektor Kesehatan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008-2010*, Diponegoro Journal of Economics volume 2, nomor 1, halm.1 133

Hasnur, Hanifah. (2014). Potret Pembiayaan Kesehatan bersumber Pemerintah: Contoh Kasus Kabupaten Pidie Jaya

Kementerian Kesehatan RI. 2011. *Materi Inti III Pokok Bahasan 2: Health Account Untuk Alokasi Biaya Kesehatan Yang Efektif Dan Efisien*. Pengembangan

Kapasitas Kepala Dinas kesehatan Provinsi dan Kabupaten/ Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan.

Handayani, Tuti dkk (2016). *Analisis Pembiayaan Kesehatan Daerah Bersumber Publik: Studi Kasus di Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Tahun 2012, 2013 dan 2014*. Jurnal Ekonomi Kesehatan Indonesia.

Sitorus, Estherlina dkk (2017). *Analisis Pembiayaan Kesehatan Bersumber Pemerintah di Kota Serang tahun 2014 – 2016*. Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia, Vol. 6, No. 3 September 2017